

**LAPORAN**  
**RENCANA KINERJA (RENJA)**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**  
**KOTA BIMA**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**



*Kota Bima 2021*  
*Jl. Gajah mada No. 10 kel. Pane Kec. Rasanae Barat Kota*  
*Bima*  
*Nomor Tlpn : 0374-43214*

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima dapat menyelesaikan Laporan Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2022.

Laporan Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2022 merupakan sarana akuntabilitas dan sebagai sarana pertanggung jawaban Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima serta dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam mengambil langkah-langkah perbaikan untuk peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima di masa- masa mendatang.

Laporan Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2022 merupakan sebuah cara pengukuran kinerja yang efektif untuk mengukur sekaligus mengevaluasi tingkat pelayanan pemerintah terhadap masyarakat sesuai dengan bidangnya yang dilakukan secara kontinyu dan merupakan suatu gambaran konkrit sebuah instansi dalam menjalankan, menghasilkan dan sekaligus memperbaiki kinerja berdasarkan aturan yang berlaku serta dapat dipertanggung jawabkan baik secara teknis maupun secara administrasi.

Atas dukungan dari semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kita semua, Aamiin.

Kota Bima, 23 Juli 2021  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan PTSP Kota Bima,

**Drs. Adisan**  
Pembina (IV/a)  
Nip. 19650729 200501 1 004

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>TABEL-TABEL</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 .....</b>	<b>6</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun 2020 dan Capaian Renstra PD.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
2.3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	24
2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	25
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	28
2.5.1. Program Usulan .....	28
2.5.2 Kegiatan .....	28
<b>BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....</b>	<b>30</b>
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Program.....	30
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	30
3.2.1. Tujuan .....	30
3.2.2. Sasaran .....	31
3.3. Program dan Kegiatan .....	34
<b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>35</b>
<b>BAB IV. PENUTUP.....</b>	<b>42</b>
<b>LAMPIRAN MATRIKS RENCANA KERJA(RENJA) 2022- 2023</b>	
<b>Beserta Pagu Indikatif beserta sumbernya perkiraan maju</b>	

## TABEL – TABEL

	Halaman
Tabel.1 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020.....	6
Tabel.2 Tabel Realisasi Program dan Kegiatan tahun 2020.....	8
Tabel. 3 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran.....	11
Tabel. 4 Evaluasi Hasil Renja SKPD.....	16
Tabel. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP.....	23
Tabel. 6 Permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi DPMPTSP	24
Tabel. 7 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020 DPMPTSP Kota Bima.....	26
Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional DPMPTSP Kota Bima.....	30
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSP Kota Bima	32
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023.....	37



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Substansi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD, saat ini disebut Perangkat Daerah) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Selain itu juga untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2022. Dalam rangka integrasi Rencana Pembangunan Daerah Kota Bima, seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja). Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena di dalam Renja menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Selain itu Renja menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah pelaksanaan program tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Kota Bima sebagai salah satu Daerah Otonom di wilayah Provinsi NTB sesuai Undang Undang nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintahan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat, tentunya harus berupaya untuk mengelola sumber daya yang ada di daerah sebaik – baiknya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah mengingat semakin berkurangnya ketergantungan pada pemerintah pusat. Maka untuk mendukung kebijakan daerah Kota Bima serta dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang perijinan dibentuklah SKPD Kantor Pelayanan Perijinan terpadu Kota Bima yang mempunyai kewenangan dalam pelayanan perijinan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima

Dengan adanya kebijakan tersebut membawa dampak perubahan pada sistem manajemen administrasi yang ada, dimana pemerintah Kota Bima diharapkan melaksanakan pembenahan pada aspek refitalisasi organisasi kelembagaan dengan cara menata kembali struktur organisasi secara terus menerus yang efektif dan efisien. Selain itu juga melakukan peningkatan profesionalisme aparatur untuk menciptakan Sumber Daya Aparatur yang mumpuni sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.



Keberhasilan pembangunan Kota Bima sejak berdirinya hingga akhir tahun 2009 mengarah pada aktifitas perkotaan yang berfokus pada pelayanan jasa dan aktifitas non pertanian lainnya, hal ini ditandai adanya alih fungsi lahan menjadi sektor usaha jasa dan pembangunan gedung – gedung kantor dan perumahan, tentu saja perkembangan ini harus diikuti dengan perubahan arah kebijakan pembangunan untuk mengoptimalkan penataan ruang dan pembangunan infrastruktur perkotaan yang diikuti dengan pengembangan aktifitas ekonomi lokal yang produktif. Pengembangan tersebut akan merambah pada peningkatan aktifitas.

Renja DPMPTSP disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan dapat menyatukan visi, misi, persepsi dan strategi seluruh aparat di DPMPTSP Kota Bima di dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik melalui pelayanan publik yang optimal. Selain itu dapat digunakan sebagai bentuk sarana evaluasi kinerja tahun sebelumnya sehingga diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada DPMPTSP Kota Bima.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang – undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang – undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin mendirikan Bangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik
10. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Import
11. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara elektronik dibidang Perdagangan.
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 tahun 2003 tentang Kewenangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima;
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008 - 2028;
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan.
17. Peraturan Daerah kota Bima Nomor 5 tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan;
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028;
19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan;
20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
21. Peraturan Walikota Bima Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 312);
22. Peraturan Walikota Bima Nomor 35 tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan;



23. Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima :

1. **Tujuan Umum** : Untuk memberikan arah dan pedoman rencana pelaksanaan Program dan kegiatan bidang Penanaman Modal dan Perizinan tahun 2022 sebagai kebijakan dalam mencapai Visi dan Misi SKPD serta Visi dan Misi Kota Bima.
2. **Tujuan Khusus** :
  - a. Mengetahui Kondisi Umum Pembangunan Bidang Penanaman Modal dan PTSP dan rencana pembangunan menuju tercapainya Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima serta visi dan misi Pemerintah Kota Bima selama 1 (satu) tahun .
  - b. Merencanakan Program dan Kegiatan Tahun 2022, SKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dan Jenis pelayanan (SPM) sehingga dapat menciptakan optimalisasi pelayanan perijinan serta Investasi Penanaman Modal dalam Negeri.
  - c. Sebagai bahan Evaluasi kinerja yang nantinya akan dituangkan dalam LKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima Tahun 2021.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Dalam uraian ini akan di bahas secara rinci tentang Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara rinci, singkat dan jelas, Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab Ini Berisi Tentang Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021. Selain Itu Memuat Juga Maksud Dan Tujuan Penyusunan, Serta Sistematika Penulisan.

#### **Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021**

Bab Ini Menguraikan Tentang Evaluasi Pencapaian Renja Tahun 2021 Sesuai Dengan Indikator Visi dan Misi, Penyerapan Dana dan Pelimpahan Tugas Yang Menjadi Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Tahun 2021



### **Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab Ini Menguraikan Gambaran Umum Tugas Pokok dan Fungsi Serta Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bima yang baru Sesuai Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 05 Tahun 2016.

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

### **BAB V PENUTUP**



**BAB II**  
**EVALUASI RENCANA KERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BIMA**  
**TAHUN 2021**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD**

Evaluasi kinerja yang dimaksud adalah evaluasi internal yaitu penilaian secara mandiri terhadap hasil pengukuran kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan guna memberikan penjelasan lebih lanjut tentang :

1. Efektifitas dan efisiensi kegiatan.
2. Efektifitas pencapaian sasaran.

Disamping itu juga diuraikan mengenai hal –hal yang mendukung keberhasilan dan faktor yang menghambat dan langkah – langkah perbaikan (pemecahan masalah) yang akan dilakukan guna perbaikan kinerja untuk masa – masa yang akan datang. (review) terhadap hasil evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu (n-2/ Tahun 2017) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/Tahun 2018), mengacu pada APBD tahun 2018. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

**2.1.1 Realisasi program dan kegiatan tahun 2021 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;**

Untuk dapat melihat Realisasi program dan kegiatan tahun 2020 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan maka, dapat disajikan dengan tabel evaluasi Hasil RKPD tahun 2020 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP dibawah ini :



## Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 Perangkat Daerah : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RKPD TAHUN 2021	REALISASI RKPD TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2</b>							
<b>Urusan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							
<b>2.18</b>							
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>							
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	100,00	98,20	98,20	ST
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	74,34	74,34	S
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelaporan dan akuntabilitas Keuangan	100,00	98,45	98,45	ST
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Jasa Perkantoran dan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Kepegawaian	100,00	97,05	97,05	ST
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas Pengadaan Perlengkapan dan peralatan gedung kantor	100,00	0,00	0,00	SR
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya penyediaan jasa dalam menunjang kebutuhan kantor	100,00	99,71	99,71	ST
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pemeliharaan Barang milik daerah	100,00	95,49	95,49	ST
2.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Porsentase peningkatan kerjasama investasi	100,00	95,66	95,66	ST
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kerjasama Investasi	1,00	95,66	9.566,00	ST
3.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rata-rata Lama proses penyelesaian pelayanan perizinan	1,00	98,41	9.841,00	ST
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah izin usaha dan non usaha yang di terbitkan	2.000,00	98,41	4,92	SR
4.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Porsentase usaha berizin dengan volume usaha meningkat	100,00	99,72	99,72	ST
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penyampaian LKPM Dalam Jaringan (Daring)	4,00	99,72	2.493,00	ST
5.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Porsentase realisasi investasi yang diterbitkan tiap tahunnyaJumlah Dokumen Realisasi Investasi	100,00	100,00	100,00	ST
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Realisasi Investasi	1,00	100,00	10.000,00	ST

Ket : ST = Sangat Tinggi  
T = Tinggi  
S = Sedang  
R = Rendah



**2.1.2 Realisasi program dan kegiatan tahun 2021 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;**

Terkait Realisasi Program dan kegiatan tahun 2021 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan, hampir pada program dan kegiatan tahun 2021 mencapai target keluaran yang diharapkan yakni diangka 98,35% realisasi pencapaian. Bisa dilihat pada program dan kegiatan dibawah ini :

**REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN DPMPTSP KOTA BIMA  
TAHUN 2021**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)	PERSEN TASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.593.956.832,00	3.534.599.593,00	59.357.239,00	98,35
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	3.593.956.832,00	3.534.599.593,00	59.357.239,00	98,35
	DINAS PENANAMAN MODAL	3.593.956.832,00	3.534.599.593,00	59.357.239,00	98,35
<b>A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		<b>3.041.598.132,00</b>	<b>2.987.148.812,00</b>	<b>54.449.320,00</b>	<b>98,21</b>
a.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.305.400,00	19.555.400,00	6.750.000,00	639,88
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.127.000,00	4.127.000,00	-	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.957.000,00	1.957.000,00	-	100,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.007.000,00	2.007.000,00	-	100,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.074.000,00	2.074.000,00	-	100,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.668.000,00	2.668.000,00	-	100,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.244.400,00	2.244.400,00	-	100,00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.228.000,00	4.478.000,00	6.750.000,00	39,88
b.	Administrasi Keuangan	2.723.505.177,00	2.681.205.707,00	42.299.470,00	392,60
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.595.788.877,00	2.560.989.407,00	34.799.470,00	98,66
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	123.732.000,00	116.232.000,00	7.500.000,00	93,94



Laporan Renja 2022 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1.548.300,00	1.548.300,00	-	100,00
4	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.436.000,00	2.436.000,00	-	100,00
c.	Administrasi Umum	123.612.815,00	119.975.967,00	3.636.848,00	477,13
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	826.100,00	826.100,00	-	100,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.942.315,00	35.934.000,00	8.315,00	99,98
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.746.400,00	14.746.400,00	-	100,00
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.110.000,00	910.000,00	200.000,00	81,98
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.988.000,00	67.559.467,00	3.428.533,00	95,17
d.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	-	-	0
e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.142.940,00	137.733.626,00	409.314,00	198,86
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	102.383.000,00	102.383.000,00	-	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.759.940,00	35.350.626,00	409.314,00	98,86
f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.031.800,00	28.678.112,00	1.353.688,00	195,04
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.271.800,00	25.918.112,00	1.353.688,00	95,04
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.760.000,00	2.760.000,00	-	100,00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	-	-	0
<b>B. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>		<b>41.693.800,00</b>	<b>39.889.600,00</b>	<b>1.804.200,00</b>	<b>95,67</b>
g.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	41.693.800,00	39.889.600,00	1.804.200,00	95,67
1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	41.693.800,00	39.889.600,00	1.804.200,00	95,67
<b>C. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>130.183.500,00</b>	<b>128.098.900,00</b>	<b>2.084.600,00</b>	<b>294,09</b>
h.	Pelayanan perizinan dan Non perizinan secara terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	130.183.500,00	128.098.900,00	2.084.600,00	294,09
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	85.681.000,00	85.227.100,00	453.900,00	99,47



Laporan Renja 2022 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	14.206.000,00	14.205.900,00	100,00	100,00
3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	30.296.500,00	28.665.900,00	1.630.600,00	94,62
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	0,00	-	-	-
<b>D. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>365.406.400,00</b>	<b>364.387.281,00</b>	<b>1.019.119,00</b>	<b>298,53</b>
i.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota	365.406.400,00	364.387.281,00	1.019.119,00	298,53
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	68.813.400,00	67.818.281,00	995.119,00	98,55
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	202.153.000,00	202.152.000,00	1.000,00	100,00
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	94.440.000,00	94.417.000,00	23.000,00	99,98
<b>E. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>		<b>15.075.000,00</b>	<b>15.075.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
j.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota	15.075.000,00	15.075.000,00	0,00	100,00
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	15.075.000,00	15.075.000,00	-	100,00



Laporan Renja 2022 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

**2.1.3. Realisasi program dan kegiatan tahun 2021 yang melebihi target kinerja keluaran dan yang direncanakan;**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Program/Sub. Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Investasi	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Perizinan dan Investasi	86,00	86,69	Program Pelayanan penanaman Modal	Rata-rata Lama Proses penyelesaian Pelayanan perizinan	1 Hari	1 Hari	1 hari
					Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	Jumlah Izin usaha dan non usaha yang diterbitkan	2000 lembar izin	1500 Lembar Izin	75 %
					Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah persetujuan pemenuhan komitmen ijin usaha yang diterbitkan	1500 izin Usaha/Izin Operasional Komersial	970	65 %
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi insentif daerah	2 Kali	0	Anggaran sudah di refocusing



**Laporan Renja 2022 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima**

				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	% Peningkatan capaian realisasi investasi	100%	100%	100%
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen realisasi investasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Porsentase peningkatan kerjasama investasi	100 %	100 %	100%
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan promosi/sosialisasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dokumen Realisasi Investasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
				PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN PROMOSI	Porsentase Peningkatan Investasi Menengah ke atas yang berizin	100 %	100%	100%
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen LKPM	50 Dokumen	19 dokemen	38%



**Laporan Renja 2022 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima**

					Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah perusahaan yang didampingi	50 Perusahaan	206 perusahaan (orang/peserta /pelaku usaha)	416%
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah dok. Hasil Bap pengawasan meningkat	50 Perusahaan	87 perusahaan	174%



Dari Tingkat Pencapaian masing-masing Indikator Kinerja Sasaran dari hasil capaian indikator kinerja berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2020, ada beberapa program/ kegiatan yang tidak mencapai target 100% yakni pada kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu dengan target Jumlah Izin usaha dan non usaha sebanyak 2500 lembar izin, tetapi cuman mencapai realisasi terbit izin sebanyak 1500 lembar izin, atau tercapai 75%, hal ini dikarenakan terjadi Pandemi Covid 2019 yang menyebabkan ekonomi melemah sehingga mempengaruhi menurunnya pendapatan masyarakat/ pelaku usaha.
2. Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal Jumlah pemenuhan komitmen dengan target sebanyak 1500 Jenis izin Usaha tetapi realisasi sebanyak 970 (izin usaha dan non usaha) atau dengan capaian 65 %, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid 2019 yang menyebabkan sedikitnya pelaku usaha yang datang mengurus izin usaha ke PTSP karena harus menjaga jarak agar tidak tertular dengan Virus Corona.
3. Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal Jumlah dokumen LKPM sebanyak 50 dokumen tetapi yang terealisasi sebanyak 19 dokumen dengan capaian sebesar 38 %, hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID 2019 , yang harus mengutamakan protokol kesehatan agar menjaga jarak, menyebabkan kurangnya koordinasi PTSP dengan pelaku usaha.

#### **2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan tahun 2021**

Secara umum dapat diketahui bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas penanaman modal dan PTSP Kota Bima mempunyai Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja.

Penyebab keberhasilan yang dominan sehingga kinerja Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Bima mencapai target yang ditentukan atau mengalami peningkatan adalah :

- 1 Adanya Kemitraan dan koordinasi antara Dinas penanaman modal dan PTSP dengan Dinas Teknis terkait;
- 2 Pelaksanaan Survey yang rutin terhadap Pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha;
- 3 Pelaksanaan Monitoring yang intens terhadap Izin usaha yang telah berakhir masa berlakunya;
- 4 Pelaksanaan Sosialisasi cakupan produk hukum kepada pelaku usaha yang berkaitan dengan perizinan kepada masyarakat pelaku usaha;



5. Tersedianya Sumber Daya Pegawai yang cukup dan memadai;
6. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan.

**2.1.5. Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja Tahun 2021;**

1. Penyesuaian Program dan kegiatan yang sesuai dengan Kependagri 50 tahun 2021
2. Penyelerasan anantara nama program dan kegiatan dari tahun yang sebelumnya dengan tahun sekarang
3. Target kinerja pada indikator sasaran atau indikator utama akan dipengaruhi oleh keadaan realisasi anggaran yang ada karena kegiatannya dipengaruhi oleh situasi pandemi yang dirasakan sekarang, yakni adanya pandemi covid-19
4. Penganggaran yang tidak sangat kurang atau minim untuk memajukan sarana dan prasarana terkait peningkatan pelayanan publik
5. Masih belum adanya aplikasi daerah yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik
6. Terkait kegiatan IKM masih dilakukan secara manual, yang diinginkan bisa menggunakan aplikasi mandiri atau sistem IKM online untuk masyarakat yang merasakan akan pelayanan pada DPMPTSP
7. Belum bisa dikatakan PTSP sebagai pelayanan satu pintu karena dinas terkait atau teknis belum ada yang berkantor ke DPMPTSP.

**2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut**

1. Melakukan sosialisai kepada pelaku usaha (Badan/perorangan) tentang aturan – aturan yang berkaitan dengan Perizinan;
2. Melakukan Pembinaan secara langsung kepada pelaku usaha (Badan/perorangan) yang akan berakhir masa berlaku izinnya;
3. Mendorong dan lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus perijinan;
4. Melakukan rapat- rapat koordinasi dengan Dinas Teknis terkait dalam hal kepengurusan pelayanan perijinan satu pintu.
5. Diharapkan bisa diberikan anggaran dan dana yang sesuai untuk sarana dan prasarana untuk meningkatkannya pelayanan publik;
6. Semoga pandemi covid-19 segera berlalu agar roda perekonomian khususnya dikota bima akan pulih kembali.



Laporan Renja 2022 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima  
Tabel 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU dan Capaian Renstra DPMPTSP  
Periode Pelaksanaan: Tahun 2021

(Anggaran Dalam Juta Rupiah)

NO	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Subkegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja Renja pd Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s.d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.				
										I	II	III	IV																
1	2	3	4		5		6		7	8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 * 100%		16	17		
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
<b>2</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																											
<b>2.18</b>		<b>Bidang URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>																											
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	persentase	0,00	0	0,00	0	100,00	3.206	14,35	437	33,95	1.033	23,62	719	26,28	799	98,20	2.987	98,20	93,18	98,20	2.987	0,00	0,00			
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase	0,00	0	0,00	0	100,00	18	17,02	4	8,02	2	12,78	3	36,52	10	74,34	20	74,34	109,22	74,34	20	0,00	0,00			
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelaporan dan akuntabilitas Keuangan	persentase	0,00	0	0,00	0	100,00	2.685	14,67	400	34,96	952	22,79	621	26,03	709	98,45	2.681	98,45	99,86	98,45	2.681	0,00	0,00			
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Jasa	persentase	0,00	0	0,00	0	100,00	202	11,10	14	27,27	34	37,82	47	20,86	26	97,05	120	97,05	59,43	97,05	120	0,00	0,00			



Laporan Renja 2022 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

NO	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Subkegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja pd Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s.d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
											I		II		III		IV			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7 * 100%				14 = 6+12		15 = 14/5 * 100%
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 * 100%		16	17	
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Perkantoran dan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Kepegawaian																										
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas Pengadaan Perlengkapan dan peralatan gedung kantor	persentase	0,00	0	0,00	0	100,00	6	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya penyediaan jasa dalam menunjang kebutuhan kantor	persentase	0,00	0	0,00	0	100,00	156	11,10	15	27,64	38	29,21	40	31,76	44	99,71	138	99,71	88,36	99,71	138	0,00	0,00			
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pemeliharaan Barang milik daerah	persentase	0,00	0	0,00	0	100,00	140	10,99	3	22,09	7	24,96	7	37,45	11	95,49	29	95,49	20,55	95,49	29	0,00	0,00			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					77,51	62,90			0,00	0,00			
Predikat Kinerja																					T	R			SR	SR			
2.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Porsentase peningkatan kerjasama investasi	persentase	0,00	0	0,00	0	100,00	42	58,26	24	20,37	8	6,52	3	10,51	4	95,66	40	95,66	95,67	95,66	40	0,00	0,00			
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kerjasama Investasi	kegiatan	0,00	0	0,00	0	1,00	42	58,26	24	20,37	8	6,52	3	10,51	4	95,66	40	9.566,00	95,67	95,66	40	0,00	0,00			



Laporan Renja 2022 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

NO	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Subkegiatan (Output)		Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja pd Tahun berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s.d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.																								
											I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp				K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 * 100%		16	17																					
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					9.566,00	95,67			0,00	0,00																							
Predikat Kinerja																					ST	ST																											
3.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rata-rata Lama proses penyelesaian pelayanan perizinan	hari	0,00	0	0,00	0	1,00	180	16,82	22	20,00	26	37,54	49	24,05	31	98,41	128	9.841,00	71,18	98,41	128	0,00	0,00																							
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah izin usaha dan non usaha yang di terbitkan	lembar	0,00	0	0,00	0	2.000,00	180	16,82	22	20,00	26	37,54	49	24,05	31	98,41	128	4,92	71,18	98,41	128	0,00	0,00																							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					4,92	71,18																											
Predikat Kinerja																					SR	S																											
4.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Porsentase usaha berizin dengan volume usaha meningkat	persentase	0,00	0	0,00	0	100,00	386	0,00	0	14,84	54	31,95	117	52,93	193	99,72	364	99,72	94,40	99,72	364	0,00	0,00																							
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penyampaian LKPM Dalam Jaringan (Daring)	kegiatan	0,00	0	0,00	0	4,00	386	0,00	0	14,84	54	31,95	117	52,93	193	99,72	364	2.493,00	94,40	99,72	364	0,00	0,00																							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					2.493,00	94,40																											
Predikat Kinerja																					ST	ST																											
5.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Porsentase realisasi investasi yang diterbitkan tiap	persentase	0,00	0	0,00	0	100,00	15	0,00	0	100,00	15	0,00	0	0,00	0	100,00	15	100,00	100,00	100,00	15	0,00	0,00																							





## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH (DPMPTSP)

Pencapaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima yang dicerminkan dalam Capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas penanaman modal dan PTSP**  
**KOTA bima**

NO	Indikator( IKU, SPM, IKK )	Angka/ Nilai target/ standard (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2017	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,64	84	85	86	87	88					
2	Porsentase Peningkatan Nilai Investasi	10%	10%	10%	10%	10%	10%					



**2.2. Analisis Kinerja SKPD**

Dalam menganalisis kinerja SKPD yang terdapat di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima meliputi :

- 1. Keterkaitan antara pencapaian kinerja kegiatan dan tujuan, misi dan visi.

Mulai dari penetapan Visi, Misi, Sasaran, Program sampai dengan kegiatan harus memiliki keterkaitan hubungan turunan, oleh karena itu antara turunan dengan yang menurunkan harus mempunyai hubungan yang logis sehingga semua komponen dapat diukur. Kegiatan tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima merupakan bagian dari program kerja dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategi (RENSTRA) tahun 2018 sampai tahun 2023, dan sebagian lagi akan dilaksanakan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Oleh karena demikian pencapaian tujuan yang ditetapkan dapat dicapai secara bertahap sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan dan dalam hal ini memiliki hubungan yang sangat logis.

- 2. Keterkaitan antara Pencapaian Kinerja dengan Pencapaian Sasaran

Berdasarkan uraian – uraian sebelumnya dari 5 Program dan 10 kegiatan tahun 2021 telah dilaksanakan dengan baik dengan capaian sasaran sebesar 98,35 % atau ketidaktercapiannya hanya sebesar 1,65 %.

**2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang berhasil diidentifikasi pada setiap urusan pemerintahan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pada periode RPJMD tahun 2013-2018. Permasalahan

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ini untuk memastikan bekerjanya perangkat daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat .

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima dalam upaya menyelenggarakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.3

Permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi DPMPSTSP

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor -Faktor Penentu Keberhasilan
12	Penanaman Modal			
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	<	Investasi masih terbatas	Iklim investasi dan perijinan



12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	<	Investasi masih terbatas	Iklm investasi dan perijinan
12.3	Rasio daya serap tenaga kerja	<	Investasi masih terbatas	Iklm investasi dan perijinan
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	<	Investasi masih terbatas	Iklm investasi dan perijinan

#### 2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD

Merupakan suatu indikator kinerja sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan dari uraian-uraian sebelumnya Rancangan program awal di tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima telah berhasil melaksanakan 5 program dengan 10 kegiatan dengan capaian sasaran sebesar 98,35 % atau ketidakcapaian hanya sebesar 1,65%.

##### 1. Akuntabilitas Penerimaan Daerah

Sebagai SKPD yang bertugas melayani perizinan yang terpusat Dinas Penanaman Modal dan PTSP melayani semua perizinan yang sebelumnya ditangani oleh masing –masing Dinas terkait.

##### 2. Akuntabilitas Pengeluaran SKPD

Selama tahun 2021 Anggaran kegiatan sebesar Rp. 3.593.956.832,00 dengan Pagu Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.595.788.877,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 998.167.955,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.534.599.593,00 atau 98,35 %.

Sehubungan dengan pengelolaan keuangan dapat dijelaskan bahwa secara garis besar pelaksanaan aspek keuangan telah sesuai dengan prinsip pelaporan yang lazim dengan pertanggung jawaban yang telah sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku, secara efektif dan efisien serta mengusahakan semaksimal mungkin terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan.



Tabel. 2.4

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021  
Perangkat Daerah : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021  
Perangkat Daerah : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RKPD TAHUN 2021	REALISASI RKPD TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2</b>	<b>Usuran URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						
<b>2.18</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>						
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	100,00	98,20	98,20	ST
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	74,34	74,34	S
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelaporan dan akuntabilitas Keuangan	100,00	98,45	98,45	ST
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Jasa Perkantoran dan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Kepegawaian	100,00	97,05	97,05	ST
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas Pengadaan Perlengkapan dan peralatan gedung kantor	100,00	0,00	0,00	SR
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya penyediaan jasa dalam menunjang kebutuhan kantor	100,00	99,71	99,71	ST
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pemeliharaan Barang milik daerah	100,00	95,49	95,49	ST
2.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Porsentase peningkatan kerjasama investasi	100,00	95,66	95,66	ST
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kerjasama Investasi	1,00	95,66	9.566,00	ST
3.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rata-rata Lama proses penyelesaian pelayanan perizinan	1,00	98,41	9.841,00	ST
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah izin usaha dan non usaha yang di terbitkan	2.000,00	98,41	4,92	SR
4.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Porsentase usaha berizin dengan volume usaha meningkat	100,00	99,72	99,72	ST
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penyampaian LKPM Dalam Jaringan (Daring)	4,00	99,72	2.493,00	ST
5.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Porsentase realisasi investasi yang diterbitkan tiap tahunnyaJumlah Dokumen Realisasi Investasi	100,00	100,00	100,00	ST
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah Dokumen Realisasi	1,00	100,00	10.000,00	ST



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RKPd TAHUN 2021	REALISASI RKPd TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
		Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Investasi				

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### 2.5.1 Program Usulan

Program Usulan kerja operasional Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategis organisasi yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan tahun yang akan datang untuk melaksanakan suatu rencana. Adapun Program Usulan yang akan dilaksanakan Sesuai dengan Kepmendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
3. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL.
4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
5. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Dari Program Usulan tersebut Program yang merupakan media untuk Peningkatan pemahaman SKPD untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan individual maupun peningkatan dinas umumnya, khususnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.

### 2.5.2. Kegiatan

Adapun Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal  
Sub kegiatan :
  - a. Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan penanaman modal
  - b. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota  
sub kegiatan :
  - a. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota



- b. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
3. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  
Sub kegiatan :
  - a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
  - b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
4. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  
Sub kegiatan :
  - a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
  - b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
  - c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
  - d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  
Sub kegiatan :
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
  - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
  - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
Sub kegiatan :
  - a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Dari kegiatan yang di laksanakan oleh masyarakat untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya di bidang perizinan dan Penanaman Modal, maka dengan adanya penambahan suatu kegiatan baru akan memberikan suatu kontribusi yang sangat baik untuk menunjang suatu kegiatan program.



**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

**3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi**

Kebijakan-kebijakan Nasional maupun Propinsi serta Program Prioritas tidak dilaksanakan oleh Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Bima karena pada prinsipnya telah dilaksanakan oleh SKPD-SKPD teknis terkait kebijakan tersebut.

**Tabel 3.1**

Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman modal dan PTSP kota Bima Tahun 2021

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	URAIAN DAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Perizinan dan Investasi	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total Unsur yang terisi}}$	Laporan hasil survey kepuasan masyarakat	Kepala Dinas

**3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan program dan kegiatan secara optimal. Oleh karena itu setiap Satuan Kerja harus merumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai melalui program dan kegiatan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Bima secara komprehensif. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Bima menetapkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan di bawah ini.

**3.2.1. Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis tahun 2018-2023 adalah :

1. Untuk mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah Kota Bima sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima.
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan.



3. Menjamin komitmen terhadap kesempatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan kedalam dokumen Renstra hingga penjabarannya.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui Kondisi Umum Pembangunan Bidang Perijinan dan rencana pembangunan menuju tercapainya Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima serta visi dan misi Pemerintah Kota Bima.
- b. Merencanakan Program dan Kegiatan Perubahan Renstra Tahun 2018 sampai Tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Pelayanan (SP) sehingga dapat menciptakan optimalisasi pelayanan perijinan
- c. Sebagai bahan Evaluasi kinerja yang nantinya akan dituangkan dalam LKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima setiap tahunnya.

### **3.2.2. Sasaran**

Sasaran strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Perangkat Daerah mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal terdiri dari kekuatan (strength), kelemahan (weakness) dan faktor eksternal terdiri dari peluang (opportunities) dan ancaman (threats).

#### **Identifikasi faktor internal yaitu :**

##### **❖ Kekuatan (Strength) :**

- a. Kewenangan fasilitasi dan koordinasi dengan pelaku usaha bidang penanaman modal
- b. Kelengkapan sarana dan prasarana
- c. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang menangani perijinan dan non perijinan
- d. Peta Potensi investasi
- e. Kewenangan perijinan terpadu melalui PTSP

##### **❖ Kelemahan (Weakness) :**

- a. Kurang optimalnya pengawasan kegiatan penanaman modal
- c. Belum tersedianya potensi area logistik sebagai destinasi investasi

#### **Identifikasi faktor eksternal yaitu :**

##### **❖ Peluang (Opportunities)**

- a. Penerapan SPIPISE dan OSS
- d. Eksistensi instansi diluar pemerintah kota untuk mendukung pelayanan perijinan dan pengawasan



- e. Pengembangan industri kerajinan tangan berbasis produk sebagai upaya peningkatan daya saing ekonomi lokal.

❖ ***Ancaman (Threats)***

- a. Adanya pengaduan masalah perijinan
- b. Kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan perijinan online
- d. Ketidaksiesuaian kepemilikan perijinan
- e. Lemahnya daya saing industri kerajinan tangan berbasis produk kewenangan perijinan terpadu melalui PTSP.



Laporan Renja 2022 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima  
Tabel. 3.2

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2018	Target kinerja tujuan/sasaran tahun ke-				
							2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Perizinan dan Nilai Investasi	1	76,86	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	IKM ( Indeks Kepuasan Layanan)	76,86	78,86	80,86	84,86	88,86	92,86
		2									
			Porsentase Peningkatan Jumlah Investor PMDN/PMA	10%	10%	10%	10%	10%	10%		



### 3.3. Program dan Kegiatan

Tujuan dan sasaran SKPD merupakan penjabaran teknis dari pada visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam bentuk Program dan Kegiatan.

*Program* merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan. Dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu.

*Kegiatan* adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja yang ada dalam Satuan Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada program dengan mengerahkan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, prasarana dan sarana maupun financial sebagai masukan ( input ) untuk menghasilkan keluaran (output) walaupun kinerja prioritasnya adalah terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kota Bima.

**Tabel. 3.3 (Tabel C-33 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 Dan Perkiraan Maju Tahun 2023 Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Bima**



Laporan Renja 2022 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

**TABEL. 3.3**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022**  
**dan Perkiraan Maju Tahun 2023**  
**Kota Bima**

**NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KOTA BIMA**

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.956.627.279,00				4.110.169.642,95
2	18					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				3.956.627.279,00				4.110.169.642,95
2	18	0.0.0.0.1				DINAS PENANAMAN MODAL				3.956.627.279,00				4.110.169.642,95
2	18	0.0.0.0.1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Kota Bima	100%	3.333.888.479,00	DAU		100%	3.500.582.902,95
2	18	0.0.0.0.1	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	100%	17.905.400,00	DAU		100%	18.800.670,00
2	18	0.0.0.0.1	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	Kota Bima	2 dokumen	4.127.000,00	DAU		2 dokumen	4.333.350,00



**Laporan Renja 2022 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima**

2	18	0.0.0.0.1	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	Kota Bima	1 dokumen	1.957.000,00	DAU		1 dokumen	2.054.850,00
2	18	0.0.0.0.1	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-P	Kota Bima	1 dokumen	2.007.000,00	DAU		1 dokumen	2.107.350,00
2	18	0.0.0.0.1	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	Kota Bima	1 dokumen	2.074.000,00	DAU		1 dokumen	2.177.700,00
2	18	0.0.0.0.1	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-P	Kota Bima	1 dokumen	1.918.000,00	DAU		1 dokumen	2.013.900,00
2	18	0.0.0.0.1	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD	Kota Bima	2 dokumen	1.344.400,00	DAU		2 dokumen	1.411.620,00
2	18	0.0.0.0.1	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKIP, LPPD	Kota Bima	2 dokumen	4.478.000,00	DAU		2 dokumen	4.701.900,00
2	18	0.0.0.0.1	01	2.02		Administrasi Keuangan	Meningkatnya Kualitas Pelaporan dan akuntabilitas Keuangan	Kota Bima	100%	2.953.764.624,00	DAU		100%	3.101.452.855,20
2	18	0.0.0.0.1	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang memperoleh gaji dan tunjangan	Kota Bima	50 orang	2.827.380.324,00	DAU		50 orang	2.968.749.340,20
2	18	0.0.0.0.1	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan	Kota Bima	12 bulan	122.400.000,00	DAU		12 bulan	128.520.000,00
2	18	0.0.0.0.1	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran	Kota Bima	1 dokumen	1.548.300,00	DAU		1 dokumen	1.625.715,00
2	18	0.0.0.0.1	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Kota Bima	1 dokumen	2.436.000,00	DAU		1 dokumen	2.557.800,00
2	18	0.0.0.0.1	01	2.06		Administrasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Jasa Perkantoran dan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Kepegawaian	Kota Bima	100%	176.309.215,00	DAU		100%	185.124.675,75
2	18	0.0.0.0.1	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kota Bima	100%	1.753.100,00	DAU		100%	1.840.755,00



**Laporan Renja 2022 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima**

2	1 8	0.0.0.0.1	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bima	12 jenis	25.942.315,00	DAU		12 jenis	27.239.430,75
2	1 8	0.0.0.0.1	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan bahan yang dicetak dan digandakan	Kota Bima	100%	10.746.400,00	DAU		100%	11.283.720,00
2	1 8	0.0.0.0.1	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bima	6 media	0,00	DAU		6 media	0,00
2	1 8	0.0.0.0.1	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Bima	51 kali	137.867.400,00	DAU		51 kali	144.760.770,00
2	1 8	0.0.0.0.1	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas Pengadaan Perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Kota Bima	100%	0,00	DAU		100%	0,00
2	1 8	0.0.0.0.1	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	Kota Bima	2 unit	0,00	DAU		2 unit	0,00
2	1 8	0.0.0.0.1	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya penyediaan jasa dalam menunjang kebutuhan kantor	Kota Bima	100%	155.877.440,00	DAU		100%	163.671.312,00
2	1 8	0.0.0.0.1	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan yang dikirim selama setahun	Kota Bima	2300 surat	102.383.000,00	DAU		2300 surat	107.502.150,00
2	1 8	0.0.0.0.1	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Bima	12 bulan	53.494.440,00	DAU		12 bulan	56.169.162,00
2	1 8	0.0.0.0.1	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pemeliharaan Barang milik daerah	Kota Bima	100%	30.031.800,00	DAU		100%	31.533.390,00
2	1 8	0.0.0.0.1	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang layak	Kota Bima	4 unit	27.271.800,00	DAU		4 unit	28.635.390,00
2	1 8	0.0.0.0.1	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor lainnya yang yang terpelihara	Kota Bima	10 unit	2.760.000,00	DAU		10 unit	2.898.000,00
2	1 8	0.0.0.0.1	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan gedung kantor yang direhab/dipelihara	Kota Bima	30%	0,00	DAU		30%	0,00



**Laporan Renja 2022 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima**

2	18	0.0.0.0.1	03			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	porsentase peningkatan nilai investasi	Kota Bima	100%	42.180.000,00	DAU		100%	44.289.000,00
2	18	0.0.0.0.1	03	2.01		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi	Kota Bima	1 Kegiatan	42.180.000,00	DAU		1 Kegiatan	44.289.000,00
2	18	0.0.0.0.1	03	2.01	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi	Kota Bima	1 kegiatan	42.180.000,00	DAU		1 kegiatan	44.289.000,00
2	18	0.0.0.0.1	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Porsentase peningkatan kerjasama investasi	Kota Bima	100%	41.693.800,00	DAU		100%	43.778.490,00
2	18	0.0.0.0.1	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah promosi penanaman modal	Kota Bima	1 Kegiatan	41.693.800,00	DAU		1 Kegiatan	43.778.490,00
2	18	0.0.0.0.1	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan promosi/sosialisasi	Kota Bima	1 kegiatan	41.693.800,00	DAU		1 kegiatan	43.778.490,00
2	18	0.0.0.0.1	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rata-rata Lama proses penyelesaian pelayanan perizinan	Kota Bima	1 Hari	179.977.000,00	DAU		1 Hari	188.975.850,00
2	18	0.0.0.0.1	04	2.01		Pelayanan perizinan dan Non perizinan secara terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha dan non usaha yang di terbitkan	Kota Bima	2000 lembar	179.977.000,00	DAU		2000 lembar	188.975.850,00
2	18	0.0.0.0.1	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin usaha dan non usaha yang di terbitkan	Kota Bima	2000 lembar	87.681.000,00	DAU		2000 lembar	92.065.050,00
2	18	0.0.0.0.1	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah persetujuan pemenuhan komitmen ijin usaha yang diterbitkan	Kota Bima	1500 ijin usaha	14.206.000,00	DAU		1500 ijin usaha	14.916.300,00



**Laporan Renja 2022 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima**

2	18	0.0.0.0.1	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	porsentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Kota Bima	100%	63.175.000,00	DAU		100%	66.333.750,00
							Jumlah Survey IKM	Kota Bima	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen	
2	18	0.0.0.0.1	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi tentang pelayanan perizinan	Kota Bima	4 kali	14.915.000,00	DAU		4 kali	15.660.750,00
2	18	0.0.0.0.1	05			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Porsentase peningkatan perusahaan yang memenuhi ketentuan yang berlaku	Kota Bima	100%	343.813.000,00	DAK		100%	361.003.650,00
2	18	0.0.0.0.1	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota	jumlah perusahaan yang melakukan penanaman modal	Kota Bima	50 dokumen	343.813.000,00	DAK		50 dokumen	361.003.650,00
2	18	0.0.0.0.1	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah dokumen LKPM	Kota Bima	50 dokumen	47.220.000,00	DAK		50 dokumen	49.581.000,00
2	18	0.0.0.0.1	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang didampingi	Kota Bima	50 perusahaan	202.153.000,00	DAK		50 perusahaan	212.260.650,00
2	18	0.0.0.0.1	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah dokumen hasil BAP pengawasan	Kota Bima	50 perusahaan	94.440.000,00	DAK		50 perusahaan	99.162.000,00
2	18	0.0.0.0.1	06			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Porsentase peningkatan capaian realisasi investasi	Kota Bima	100%	15.075.000,00	DAU		100%	15.828.750,00
2	18	0.0.0.0.1	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perinan dan Non Perizinan terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Nilai Investasi	Kota Bima	1 dokumen	15.075.000,00	DAU		1 dokumen	15.828.750,00



**Laporan Renja 2022 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima**

2	18	0.0.0.0.1	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Realisasi investasi	Kota Bima	1 dokumen	15.075.000,00	DAU	1 dokumen	15.828.750,00
---	----	-----------	----	------	----	---	------------------------------------	-----------	-----------	---------------	-----	-----------	---------------



## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima yaitu meningkatkan realisasi penanaman modal dalam mewujudkan masyarakat Kota Bima yang semakin sejahtera dan meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah, telah ditetapkan sasaran melalui pencapaian indeks kepuasan masyarakat dan peningkatan realisasi penanaman modal.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Penanaman modal  
Kegiatan diarahkan pada penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui Penyelesaian Perizinan Sesuai Standar Pelayanan diantaranya dengan pengembangan Gerai Pelayanan Perizinan. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan sesuai Standar Pelayanan sebesar 92%.
2. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal  
Kegiatan diarahkan pada penanganan pengaduan serta peningkatan prasarana sarana layanan., melalui penyelesaian pengaduan masyarakat dan analisis Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat sebesar 100% dan Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan sebesar 90%.
3. PROGRAM IKLIM PENANAMAN MODAL  
Kegiatan diarahkan pada penerbitan regulasi yang tepat untuk penanaman modal sehingga mengharapkan tersusunya dokumen kebijakan daerah sesuai dengan kebutuhan dan persentase pemenuhan 100%
4. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL  
Kegiatan diarahkan pada kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal diantaranya melalui Kemitraan Antar Pelaku Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM, serta Pameran Investasi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Rasio Jumlah Izin Usaha dan/atau Izin Komersial/Izin Operasional terhadap jumlah Kepeminatan Penanaman Modal sebesar 21% dan Rasio Jumlah Realisasi Kemitraan Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM terhadap jumlah Kepeminatan Kemitraan Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM sebesar 23%.
5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  
Kegiatan diarahkan pada pengawasan, pengendalian, serta monitoring dan



Laporan Renja 2022 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

evaluasi, antar lain melalui Pemantauan Perusahaan, dan Penyelesaian Penanaman Modal. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Realisasi Proyek Penanaman Modal di Kota Bima sebesar 15%.

Guna tercapainya target indikator tersebut, terlampir Rencana Kerja Program dan Kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatif tahun 2022 serta perkiraan maju tahun 2023 sebagaimana tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif**

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.956.627.279,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				3.956.627.279,00	
DINAS PENANAMAN MODAL				3.956.627.279,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Kota Bima	100%	3.333.888.479,00	DAU
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	100%	17.905.400,00	DAU
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	Kota Bima	2 dokumen	4.127.000,00	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	Kota Bima	1 dokumen	1.957.000,00	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-P	Kota Bima	1 dokumen	2.007.000,00	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	Kota Bima	1 dokumen	2.074.000,00	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-P	Kota Bima	1 dokumen	1.918.000,00	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD	Kota Bima	2 dokumen	1.344.400,00	DAU
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKIP, LPPD	Kota Bima	2 dokumen	4.478.000,00	DAU
Administrasi Keuangan	Meningkatnya Kualitas Pelaporan dan akuntabilitas Keuangan	Kota Bima	100%	2.953.764.624,00	DAU
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang memperoleh gaji dan tunjangan	Kota Bima	50 orang	2.827.380.324,00	DAU
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan	Kota Bima	12 bulan	122.400.000,00	DAU



Laporan Renja 2022 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran	Kota Bima	1 dokumen	1.548.300,00	DAU
Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Kota Bima	1 dokumen	2.436.000,00	DAU
Administrasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Jasa Perkantoran dan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Kepegawaian	Kota Bima	100%	176.309.215,00	DAU
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kota Bima	100%	1.753.100,00	DAU
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bima	12 jenis	25.942.315,00	DAU
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan bahan yang dicetak dan digandakan	Kota Bima	100%	10.746.400,00	DAU
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bima	6 media	0,00	DAU
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Bima	51 kali	137.867.400,00	DAU
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas Pengadaan Perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Kota Bima	100%	0,00	DAU
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	Kota Bima	2 unit	0,00	DAU
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya penyediaan jasa dalam menunjang kebutuhan kantor	Kota Bima	100%	155.877.440,00	DAU
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan yang dikirim selama setahun	Kota Bima	2300 surat	102.383.000,00	DAU
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Bima	12 bulan	53.494.440,00	DAU
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pemeliharaan Barang milik daerah	Kota Bima	100%	30.031.800,00	DAU
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang layak	Kota Bima	4 unit	27.271.800,00	DAU
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor lainnya yang terpelihara	Kota Bima	10 unit	2.760.000,00	DAU
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan gedung kantor yang direhab/dipelihara	Kota Bima	30%	0,00	DAU
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	persentase peningkatan nilai investasi	Kota Bima	100%	42.180.000,00	DAU



Laporan Renja 2022 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi	Kota Bima	1 Kegiatan	42.180.000,00	DAU
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi	Kota Bima	1 kegiatan	42.180.000,00	DAU
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Porsentase peningkatan kerjasama investasi	Kota Bima	100%	41.693.800,00	DAU
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah promosi penanaman modal	Kota Bima	1 Kegiatan	41.693.800,00	DAU
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan promosi/sosialisasi	Kota Bima	1 kegiatan	41.693.800,00	DAU
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rata-rata Lama proses penyelesaian pelayanan perizinan	Kota Bima	1 Hari	179.977.000,00	DAU
Pelayanan perizinan dan Non perizinan secara terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha dan non usaha yang di terbitkan	Kota Bima	2000 lembar	179.977.000,00	DAU
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin usaha dan non usaha yang di terbitkan	Kota Bima	2000 lembar	87.681.000,00	DAU
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah persetujuan pemenuhan komitmen ijin usaha yang diterbitkan	Kota Bima	1500 ijin usaha	14.206.000,00	DAU
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	porsentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Kota Bima	100%	63.175.000,00	DAU
	Jumlah Survey IKM	Kota Bima	4 Dokumen		4 Dokumen
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi tentang pelayanan perizinan	Kota Bima	4 kali	14.915.000,00	DAU
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Porsentase peningkatan perusahaan yang memenuhi ketentuan yang berlaku	Kota Bima	100%	343.813.000,00	DAK
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota	jumlah perusahaan yang melakukan penanaman modal	Kota Bima	50 dokumen	343.813.000,00	DAK
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah dokumen LKPM	Kota Bima	50 dokumen	47.220.000,00	DAK
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang didampingi	Kota Bima	50 perusahaan	202.153.000,00	DAK
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah dokumen hasil BAP pengawasan	Kota Bima	50 perusahaan	94.440.000,00	DAK



**Laporan Renja 2022 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima**

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Porsentase peningkatan capaian realisasi investasi	Kota Bima	100%	15.075.000,00	DAU
Pengelolaan Data dan Informasi Perinan dan Non Perizinan terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Nilai Investasi	Kota Bima	1 dokumen	15.075.000,00	DAU
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Realisasi investasi	Kota Bima	1 dokumen	15.075.000,00	DAU



**BAB. V**  
**P E N U T U P**

Sebagai uraian terakhir pada bab penutup Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Bima Tahun 2022 ini, disampaikan dengan kaidah pelaksanaan rencana Kerja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai Ketentuan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima ini, selanjutnya akan dijadikan bahan penyempurnaan Rencana Daerah Pemerintah daerah Kota Bima (RKPD) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima.
2. Dengan ditetapkannya Renja DPMPTSP Kota Bima ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholder) di lingkup DPMPTSP Kota Bima terikat untuk menjadikannya acuan dan arahan operasionalisasi dalam pelaksanaan Program dan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT).
3. Renja Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Bima tahun 2022 ini, akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja tahun 2022 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja tahun 2022 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada tahun yang sama.
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Bima tahun 2022 ini, dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat asas dalam perencanaan kegiatan dan program pembangunan dan dapat dihindari adanya kegiatan dan program yang keluar dari kesepakatan Renja ini.

Raba-Bima, 16 Maret 2022

Kepala Dinas Penanaman modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kota Bima,

**Drs. Adisan**  
Pembina (IV/a)  
Nip. 196507292005011004

**TABEL 3.3**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022**  
**dan Perkiraan Maju Tahun 2023**  
**Kota Bima**

**NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KOTA BIMA**

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								4.110.169.642,95
2	18					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								4.110.169.642,95
2	18	0.0.0.0.1				DINAS PENANAMAN MODAL								4.110.169.642,95
2	18	0.0.0.0.1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Kota Bima	100%	3.333.888.479,00	DAU		100%	3.500.582.902,95
2	18	0.0.0.0.1	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	100%	17.905.400,00	DAU		100%	18.800.670,00
2	18	0.0.0.0.1	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	Kota Bima	2 dokumen	4.127.000,00	DAU		2 dokumen	4.333.350,00
2	18	0.0.0.0.1	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	Kota Bima	1 dokumen	1.957.000,00	DAU		1 dokumen	2.054.850,00
2	18	0.0.0.0.1	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-P	Kota Bima	1 dokumen	2.007.000,00	DAU		1 dokumen	2.107.350,00
2	18	0.0.0.0.1	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	Kota Bima	1 dokumen	2.074.000,00	DAU		1 dokumen	2.177.700,00
2	18	0.0.0.0.1	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-P	Kota Bima	1 dokumen	1.918.000,00	DAU		1 dokumen	2.013.900,00
2	18	0.0.0.0.1	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD	Kota Bima	2 dokumen	1.344.400,00	DAU		2 dokumen	1.411.620,00
2	18	0.0.0.0.1	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKIP, LPPD	Kota Bima	2 dokumen	4.478.000,00	DAU		2 dokumen	4.701.900,00
2	18	0.0.0.0.1	01	2.02		Administrasi Keuangan	Meningkatnya Kualitas Pelaporan dan akuntabilitas Keuangan	Kota Bima	100%	2.953.764.624,00	DAU		100%	3.101.452.855,20
2	18	0.0.0.0.1	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang memperoleh gaji dan tunjangan	Kota Bima	50 orang	2.827.380.324,00	DAU		50 orang	2.968.749.340,20
2	18	0.0.0.0.1	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan	Kota Bima	12 bulan	122.400.000,00	DAU		12 bulan	128.520.000,00
2	18	0.0.0.0.1	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran	Kota Bima	1 dokumen	1.548.300,00	DAU		1 dokumen	1.625.715,00
2	18	0.0.0.0.1	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Kota Bima	1 dokumen	2.436.000,00	DAU		1 dokumen	2.557.800,00
2	18	0.0.0.0.1	01	2.06		Administrasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Jasa Perkantoran dan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Kepegawaian	Kota Bima	100%	176.309.215,00	DAU		100%	185.124.675,75
2	18	0.0.0.0.1	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kota Bima	100%	1.753.100,00	DAU		100%	1.840.755,00
2	18	0.0.0.0.1	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bima	12 jenis	25.942.315,00	DAU		12 jenis	27.239.430,75
2	18	0.0.0.0.1	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan bahan yang dicetak dan digandakan	Kota Bima	100%	10.746.400,00	DAU		100%	11.283.720,00
2	18	0.0.0.0.1	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bima	6 media	0,00	DAU		6 media	0,00
2	18	0.0.0.0.1	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Bima	51 kali	137.867.400,00	DAU		51 kali	144.760.770,00

Kode Rekening						Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	0.0.0.0.1	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas Pengadaan Perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Kota Bima	100%	0,00	DAU		100%	0,00
2	18	0.0.0.0.1	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	Kota Bima	2 unit	0,00	DAU		2 unit	0,00
2	18	0.0.0.0.1	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Meningkatnya penyediaan jasa dalam menunjang kebutuhan kantor	Kota Bima	100%	155.877.440,00	DAU		100%	163.671.312,00
2	18	0.0.0.0.1	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan yang dikirim selama setahun	Kota Bima	2300 surat	102.383.000,00	DAU		2300 surat	107.502.150,00
2	18	0.0.0.0.1	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Bima	12 bulan	53.494.440,00	DAU		12 bulan	56.169.162,00
2	18	0.0.0.0.1	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pemeliharaan Barang milik daerah	Kota Bima	100%	30.031.800,00	DAU		100%	31.533.390,00
2	18	0.0.0.0.1	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang layak	Kota Bima	4 unit	27.271.800,00	DAU		4 unit	28.635.390,00
2	18	0.0.0.0.1	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor lainnya yang yang terpelihara	Kota Bima	10 unit	2.760.000,00	DAU		10 unit	2.898.000,00
2	18	0.0.0.0.1	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan gedung kantor yang direhab/dipelihara	Kota Bima	30%	0,00	DAU		30%	0,00
2	18	0.0.0.0.1	03			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	porsentase peningkatan nilai investasi	Kota Bima	100%	42.180.000,00	DAU		100%	44.289.000,00
2	18	0.0.0.0.1	03	2.01		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi	Kota Bima	1 Kegiatan	42.180.000,00	DAU		1 Kegiatan	44.289.000,00
2	18	0.0.0.0.1	03	2.01	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi	Kota Bima	1 kegiatan	42.180.000,00	DAU		1 kegiatan	44.289.000,00
2	18	0.0.0.0.1	03			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Porsentase peningkatan kerjasama investasi	Kota Bima	100%	41.693.800,00	DAU		100%	43.778.490,00
2	18	0.0.0.0.1	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah promosi penanaman modal	Kota Bima	1 Kegiatan	41.693.800,00	DAU		1 Kegiatan	43.778.490,00
2	18	0.0.0.0.1	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan promosi/sosialisasi	Kota Bima	1 kegiatan	41.693.800,00	DAU		1 kegiatan	43.778.490,00
2	18	0.0.0.0.1	04			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Rata-rata Lama proses penyelesaian pelayanan perizinan	Kota Bima	1 Hari	179.977.000,00	DAU		1 Hari	188.975.850,00
2	18	0.0.0.0.1	04	2.01		Pelayanan perizinan dan Non perizinan secara terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha dan non usaha yang di terbitkan	Kota Bima	2000 lembar	179.977.000,00	DAU		2000 lembar	188.975.850,00
2	18	0.0.0.0.1	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin usaha dan non usaha yang di terbitkan	Kota Bima	2000 lembar	87.681.000,00	DAU		2000 lembar	92.065.050,00
2	18	0.0.0.0.1	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah persetujuan pemenuhan komitmen ijin usaha yang diterbitkan	Kota Bima	1500 ijin usaha	14.206.000,00	DAU		1500 ijin usaha	14.916.300,00
2	18	0.0.0.0.1	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	porsentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Kota Bima	100%	63.175.000,00	DAU		100%	66.333.750,00
							Jumlah Survey IKM	Kota Bima	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen	

tambahan

Kode Rekening						Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan/Dana Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	0.0.0.0.1	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi tentang pelayanan perizinan	Kota Bima	4 kali	14.915.000,00	DAU		4 kali	15.660.750,00
2	18	0.0.0.0.1	05			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Porsentase peningkatan perusahaan yang memenuhi ketentuan yang berlaku	Kota Bima	100%	343.813.000,00	DAK		100%	361.003.650,00
2	18	0.0.0.0.1	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota	jumlah perusahaan yang melakukan penanaman modal	Kota Bima	50 dokumen	343.813.000,00	DAK		50 dokumen	361.003.650,00
2	18	0.0.0.0.1	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah dokumen LKPM	Kota Bima	50 dokumen	47.220.000,00	DAK		50 dokumen	49.581.000,00
2	18	0.0.0.0.1	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang didampingi	Kota Bima	50 perusahaan	202.153.000,00	DAK		50 perusahaan	212.260.650,00
2	18	0.0.0.0.1	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah dokumen hasil BAP pengawasan	Kota Bima	50 perusahaan	94.440.000,00	DAK		50 perusahaan	99.162.000,00
2	18	0.0.0.0.1	06			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Porsentase peningkatan capaian realisasi investasi	Kota Bima	100%	15.075.000,00	DAU		100%	15.828.750,00
2	18	0.0.0.0.1	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perinan dan Non Perizinan terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Nilai Investasi	Kota Bima	1 dokumen	15.075.000,00	DAU		1 dokumen	15.828.750,00
2	18	0.0.0.0.1	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Realisasi investasi	Kota Bima	1 dokumen	15.075.000,00	DAU		1 dokumen	15.828.750,00